



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Tata Pelaksanaan Layanan Publik Di Kabupaten Bone Bolango

Implementation of Bureaucratic Reform in Public Service Delivery in Bone Bolango Regency

Sri Yulianty Mozin^{1*}, Rahmatia Pakaya², Mohamad Iqshal Botutihe³, Tiara Kasih Salihi⁴, Irmawati Aripin⁵, Muhammad Fajri Sulhandi⁶

¹⁻⁶Prodi Administrasi Publik, FIS Universitas Negeri Gorontalo

*Corresponding Author: E-mail: yulmozin@ung.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 17 Nov, 2025

Kata Kunci:

Reformasi Birokrasi, Tata Pelaksanaan, Layanan Publik, Bone Bolango

Keywords:

Bureaucratic Reform, Implementation, Public Services, Bone Bolango

DOI: [10.56338/jks.v8i11.9220](https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9220)

ABSTRAK

Reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas tata pelaksanaan layanan publik di Indonesia. Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi reformasi birokrasi pada tata pelaksanaan layanan publik di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Bone Bolango telah berjalan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur. Namun, tantangan masih muncul berupa keterbatasan sumber daya manusia, resistensi perubahan, serta kurangnya optimalisasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara maksimal.

ABSTRACT

Bureaucratic reform is one of the main strategies for improving the quality of public service delivery in Indonesia. Bone Bolango Regency, as one of the autonomous regions in Gorontalo Province, faces challenges in realizing a clean, transparent, accountable, and community-oriented government. This study aims to analyze the implementation of bureaucratic reform in the delivery of public services in Bone Bolango Regency. The research method uses a descriptive qualitative approach through literature study and secondary data obtained from various sources. The results show that the implementation of bureaucratic reform in Bone Bolango has been carried out through the simplification of procedures, the use of information technology, and the improvement of the competence of the apparatus. However, challenges still arise in the form of limited human resources, resistance to change, and a lack of optimization of the monitoring system. Therefore, more adaptive and innovative strategies are needed so that the objectives of bureaucratic reform can be achieved to the maximum extent possible.

PENDAHULUAN

Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui birokrasi, pemerintah menjalankan fungsi-fungsi utama negara, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan. Namun dalam praktiknya, birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti prosedur yang panjang, pelayanan publik yang kurang efektif, tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi, serta maraknya praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN). Kondisi tersebut menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjadi hambatan serius bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai upaya mengatasi berbagai kelemahan tersebut, pemerintah meluncurkan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Reformasi ini menekankan perlunya transformasi birokrasi secara menyeluruh, baik dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia aparatur. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya sebatas perubahan administratif, tetapi juga menyentuh pada perubahan paradigma, mentalitas, dan budaya kerja aparatur negara.

Di sisi lain, konsep good governance hadir sebagai kerangka normatif yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, birokrasi diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi reformasi birokrasi dipandang sebagai prasyarat penting bagi terwujudnya good governance.

Dalam konteks daerah, keberhasilan implementasi reformasi birokrasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Bone Bolango, sebagai salah satu daerah di Provinsi Gorontalo, merupakan contoh yang menarik untuk dikaji karena pemerintah daerahnya terus berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pro-rakyat. Melalui berbagai program inovatif di bidang pelayanan publik, pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan, serta penguatan pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Bone Bolango berusaha menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi reformasi tata pelaksanaan birokrasi dalam mewujudkan good governance, khususnya melalui studi kasus di Kabupaten Bone Bolango. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi, keberhasilan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi birokrasi di tingkat daerah, sehingga dapat menjadi pembelajaran dan referensi dalam memperkuat agenda reformasi birokrasi di Indonesia.

Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan yang dirancang secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Istilah ini tidak sekadar bermakna yg pembenahan teknis pada struktur organisasi atau prosedur kerja, melainkan juga menyangkut transformasi paradigma, budaya kerja, dan mentalitas aparatur negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks di era demokrasi dan globalisasi.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), reformasi birokrasi didefinisikan sebagai upaya melakukan perubahan besar dalam hal sistem manajemen pemerintahan, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia aparatur, untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, serta berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia memandang reformasi birokrasi sebagai fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Dwiyanto (2021) dalam bukunya *Manajemen Reformasi Birokrasi*, reformasi birokrasi adalah gerakan pembaruan yang dimaksudkan untuk mengatasi disfungsi birokrasi dan mengembalikan birokrasi pada hakikatnya sebagai instrumen negara untuk melayani kepentingan publik. Ia menekankan bahwa perubahan tidak boleh hanya berhenti pada level prosedural atau administratif, melainkan harus menyentuh substansi seperti peningkatan kualitas pelayanan, penguatan akuntabilitas, serta perbaikan hubungan antara birokrasi dan masyarakat.

Sementara itu, Prasojo (2022) dalam bukunya *Reformasi Birokrasi dan Tantangan Tata Kelola* menjelaskan bahwa reformasi birokrasi adalah proses perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan birokrasi yang efisien, transparan, serta akuntabel. Menurutnya, reformasi birokrasi adalah instrumen penting untuk mewujudkan *good governance* dengan cara memperbaiki sistem regulasi, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat.

Marwanto dan Nurhidayat (2020) dalam *Jurnal Administrasi Publik* menambahkan bahwa reformasi birokrasi adalah strategi pembangunan yang digunakan untuk menghilangkan praktik-praktik birokrasi yang lamban, kaku, serta tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka menekankan bahwa reformasi birokrasi seharusnya menjadi solusi atas persoalan tumpang tindih regulasi, rendahnya kualitas pelayanan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih kuatnya budaya patrimonial dalam birokrasi Indonesia.

Dengan demikian, secara lengkap dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi adalah upaya fundamental untuk mentransformasi birokrasi, baik dari segi struktur, prosedur, sumber daya manusia, maupun budaya kerja, agar tercipta birokrasi yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi tidak hanya merupakan agenda administratif, tetapi juga merupakan agenda politik, sosial, dan budaya yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

Ruang lingkup reformasi birokrasi pada dasarnya mencakup seluruh aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari struktur organisasi, ketatalaksanaan, hingga kualitas sumber daya manusia aparatur. Dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025* yang dikeluarkan Kementerian PAN-RB, ruang lingkup reformasi birokrasi dibagi ke dalam tiga area utama, yaitu kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur. Ketiganya merupakan inti dari reformasi birokrasi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena perubahan birokrasi tidak akan berhasil jika hanya berfokus pada salah satu aspek saja.

Pertama, ruang lingkup kelembagaan mencakup penataan struktur organisasi pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. Selama ini birokrasi di Indonesia cenderung gemuk dengan banyaknya unit kerja yang memiliki kewenangan serupa sehingga menyebabkan inefisiensi. Melalui reformasi kelembagaan, dilakukan penyederhanaan organisasi, penghapusan struktur yang tidak relevan, penguatan fungsi koordinasi, serta penataan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Prasojo (2022) dalam *Reformasi Birokrasi dan Tantangan Tata Kelola*, perbaikan kelembagaan merupakan fondasi penting agar birokrasi dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang cepat berubah.

Kedua, ruang lingkup tata laksana meliputi perbaikan sistem, proses, dan prosedur kerja birokrasi agar lebih sederhana, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Selama ini birokrasi diidentikkan dengan prosedur yang panjang dan berbelit-belit, sehingga reformasi diarahkan untuk menciptakan tata laksana yang efisien, memangkas jalur birokrasi yang tidak perlu, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pemerintahan (*e-government* dan SPBE). Marwanto dan Nurhidayat (2020) dalam *Jurnal Administrasi Publik* menekankan bahwa penyederhanaan tata laksana merupakan kunci

dalam mencegah praktik KKN sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Ketiga, ruang lingkup reformasi birokrasi mencakup sumber daya manusia aparatur yang menjadi aktor utama dalam birokrasi. Reformasi diarahkan pada pengelolaan SDM berbasis sistem merit, yakni rekrutmen, promosi, dan mutasi aparatur yang didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan pada kedekatan politik atau hubungan pribadi. Selain itu, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, serta penguatan etika dan budaya kerja aparatur negara. Dwiyanto (2021) dalam bukunya *Manajemen Reformasi Birokrasi* menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sangat ditentukan oleh kualitas aparatur, sebab teknologi dan struktur organisasi yang baik tidak akan efektif tanpa SDM yang profesional dan berintegritas.

Selain tiga aspek utama tersebut, ruang lingkup reformasi birokrasi juga mencakup area perubahan lain yang bersifat mendukung, seperti penataan regulasi, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi. Wahyudi (2020) dalam *Jurnal Politik dan Pemerintahan* menekankan pentingnya aspek budaya kerja, karena mentalitas birokrasi yang masih patrimonial dan feodal sering kali menjadi penghambat reformasi. Oleh karena itu, ruang lingkup reformasi tidak hanya menyentuh aspek struktural dan prosedural, tetapi juga aspek kultural yang membentuk perilaku birokrasi sehari-hari.

Dengan demikian, ruang lingkup reformasi birokrasi mencakup kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia aparatur sebagai inti, yang diperluas dengan aspek regulasi, akuntabilitas, pelayanan publik, serta perubahan budaya kerja. Seluruh ruang lingkup ini harus diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan agar reformasi birokrasi benar-benar mampu mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tujuan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi memiliki tujuan fundamental untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Secara garis besar, tujuan reformasi birokrasi di Indonesia termuat dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025* yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Dokumen tersebut menegaskan bahwa tujuan utama reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan ciri-ciri berintegritas, netral, kompeten, berkinerja tinggi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani masyarakat secara adil dan transparan. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya sekadar perbaikan teknis, tetapi juga transformasi nilai, budaya kerja, dan perilaku aparatur negara.

Pertama, reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik KKN. Birokrasi di Indonesia selama ini sering diidentikkan dengan praktik koruptif, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang. Reformasi diarahkan agar seluruh aparatur negara bekerja berdasarkan integritas, profesionalisme, dan etika pelayanan. Dwiyanto (2021) dalam bukunya *Manajemen Reformasi Birokrasi* menegaskan bahwa salah satu tujuan paling mendasar reformasi adalah menumbuhkan birokrasi yang bersih, karena birokrasi yang koruptif tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kedua, reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Struktur birokrasi di Indonesia dikenal gemuk dan cenderung lamban dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, reformasi diarahkan pada penyederhanaan struktur, deregulasi, pemangkasan proses yang berbelit-belit, serta optimalisasi teknologi informasi agar birokrasi dapat bekerja lebih cepat, hemat biaya, dan adaptif terhadap perubahan. Menurut Prasajo (2022) dalam *Reformasi Birokrasi dan Tantangan Tata Kelola*, birokrasi yang efektif dan efisien adalah syarat penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat dan cepat.

Ketiga, tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi pada hakikatnya hadir untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Oleh karena itu, orientasi utama reformasi adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik agar lebih mudah, cepat, terjangkau, transparan, dan memuaskan. Hal ini diwujudkan melalui inovasi pelayanan, penerapan e-government, serta standar pelayanan minimal di seluruh instansi pemerintah. Penelitian Wicaksono (2019) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan menyebut bahwa pelayanan publik yang prima menjadi indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi, karena langsung dirasakan oleh masyarakat.

Keempat, reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. Akuntabilitas berarti setiap instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, kewenangan, serta hasil kerja yang dicapai. Dengan adanya sistem evaluasi kinerja yang transparan dan objektif, birokrasi diharapkan lebih disiplin, profesional, serta mampu mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Wahyudi (2020) dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan menekankan bahwa akuntabilitas merupakan sarana utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Kelima, tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan kapasitas dan integritas sumber daya manusia aparatur. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, etos kerja, serta integritas tinggi agar dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang modern. Oleh karena itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan sistem manajemen SDM berbasis merit, yakni rekrutmen, promosi, dan mutasi yang objektif berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan atas dasar kedekatan politik atau hubungan personal.

Secara lebih luas, tujuan reformasi birokrasi juga berhubungan dengan terciptanya good governance. Pemerintahan yang bersih, transparan, responsif, serta akuntabel adalah cita-cita utama reformasi. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan birokrasi dapat menjadi instrumen negara yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat demokrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tantangan, dan Hambatan Reformasi Birokrasi

Tantangan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal birokrasi itu sendiri. Tantangan pertama adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik di tengah budaya birokrasi yang masih kental dengan pola patrimonialisme dan feodalisme. Banyak aparatur negara masih terbiasa dengan budaya kerja yang hierarkis, kurang inovatif, dan lebih mementingkan kepatuhan formal daripada hasil kinerja. Menurut Dwiyanto (2021) dalam Manajemen Reformasi Birokrasi, mengubah budaya birokrasi adalah tantangan terbesar karena menyangkut perubahan mentalitas, nilai, dan perilaku aparatur yang sudah mengakar.

Tantangan kedua adalah menghadapi era digitalisasi dan globalisasi yang menuntut birokrasi untuk adaptif dan inovatif. Pemerintah Indonesia telah mendorong penerapan e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi tantangan muncul dari kesiapan infrastruktur teknologi, disparitas kualitas SDM, serta resistensi terhadap perubahan digital. Prasoso (2022) dalam Reformasi Birokrasi dan Tantangan Tata Kelola menegaskan bahwa birokrasi Indonesia harus mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dengan membangun pelayanan publik yang berbasis teknologi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Tantangan lain adalah memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Selama ini birokrasi sering dinilai lamban, berbelit-belit, dan sarat praktik KKN. Untuk membangun kembali legitimasi dan kepercayaan masyarakat, reformasi birokrasi dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan. Penelitian Wahyudi (2020) dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan menekankan bahwa tanpa kepercayaan publik, reformasi birokrasi akan kehilangan makna, karena birokrasi tidak lagi dipandang sebagai pelayan masyarakat melainkan sekadar mesin administratif.

Hambatan Reformasi Birokrasi

Selain tantangan yang bersifat prospektif, reformasi birokrasi juga menghadapi sejumlah hambatan yang nyata di lapangan. Hambatan pertama adalah lemahnya komitmen politik dari para pemangku kepentingan. Banyak kebijakan reformasi birokrasi berhenti pada tataran wacana karena adanya tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Reformasi sering kali dijadikan jargon politik tanpa implementasi yang konsisten. Marwanto dan Nurhidayat (2020) dalam Jurnal Administrasi Publik menegaskan bahwa rendahnya political will menyebabkan agenda reformasi birokrasi berjalan lambat dan parsial.

Hambatan berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata. Masih banyak ASN yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, rendahnya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, serta masih adanya aparatur yang tidak memiliki integritas. Kondisi ini diperburuk dengan sistem rekrutmen dan promosi yang belum sepenuhnya berbasis merit, sehingga aparatur yang dipilih tidak selalu yang paling kompeten. Dwiyanto (2021) menekankan bahwa birokrasi modern hanya bisa berjalan baik apabila memiliki SDM yang profesional, sementara kenyataannya masih banyak ASN yang terjebak pada mentalitas lama.

Hambatan lain terletak pada kelembagaan yang gemuk dan tumpang tindih kewenangan. Banyak instansi pemerintah memiliki fungsi serupa, sehingga menyebabkan inefisiensi dan lemahnya koordinasi. Ego sektoral antar instansi juga membuat agenda reformasi birokrasi tidak berjalan sinergis. Prasajo (2022) menyoroti bahwa hambatan kelembagaan inilah yang membuat birokrasi Indonesia lamban beradaptasi dan sulit menyatu dalam sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Selain faktor internal, reformasi birokrasi juga terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong akuntabilitas birokrasi. Namun, rendahnya literasi masyarakat tentang hak-hak pelayanan publik serta terbatasnya akses informasi membuat peran masyarakat dalam mengontrol jalannya birokrasi masih minim. Penelitian Wicaksono (2019) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial memperburuk praktik birokrasi yang tidak transparan.

Aspek-Aspek Reformasi Birokrasi

Aspek-aspek dari reformasi birokrasi pada dasarnya mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertama, aspek kelembagaan menjadi hal yang sangat penting karena struktur birokrasi yang gemuk, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya koordinasi antarlembaga sering kali menjadi hambatan utama. Reformasi kelembagaan diarahkan pada penyederhanaan struktur, penataan organisasi, serta penguatan fungsi koordinasi sehingga birokrasi dapat lebih adaptif dan responsif. Menurut Prasajo (2022) dalam bukunya Reformasi Birokrasi dan Tantangan Tata Kelola, perbaikan kelembagaan merupakan pondasi awal agar birokrasi memiliki sistem kerja yang lebih ramping dan efektif.

Kedua, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi inti dari reformasi birokrasi. Aparatur sipil negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas yang tinggi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menekankan peningkatan kualitas SDM melalui rekrutmen berbasis merit, pelatihan berkelanjutan, sistem karier yang transparan, serta penegakan kode etik. Dwiyanto (2021) dalam Manajemen Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa SDM yang kompeten adalah penggerak

utama keberhasilan reformasi, sebab teknologi dan sistem tidak akan berjalan efektif tanpa aktor yang memiliki integritas dan kemampuan.

Aspek ketiga adalah regulasi dan tata laksana. Reformasi birokrasi diarahkan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan publik, mengurangi tumpang tindih regulasi, serta memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga deregulasi menjadi bagian penting untuk menciptakan birokrasi yang efisien. Penelitian Marwanto dan Nurhidayat (2020) dalam Jurnal Administrasi Publik menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu banyak dan tidak sinkron menimbulkan inefisiensi, sehingga reformasi perlu difokuskan pada simplifikasi aturan dan digitalisasi tata kelola.

Aspek berikutnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Reformasi birokrasi tidak hanya soal struktur dan prosedur, tetapi juga menyangkut tanggung jawab birokrasi dalam mengelola sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem evaluasi yang objektif serta transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi syarat utama terciptanya birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wahyudi (2020) dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan menyatakan bahwa tanpa akuntabilitas dan transparansi, reformasi birokrasi hanya akan berhenti pada aspek administratif tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Terakhir, aspek pelayanan publik menjadi tujuan utama dari seluruh agenda reformasi birokrasi. Reformasi diarahkan agar birokrasi mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, transparan, dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penerapan e-government, inovasi pelayanan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Wicaksono (2019) dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan menekankan bahwa pelayanan publik yang prima merupakan indikator ke

berhasilan reformasi birokrasi, karena pada akhirnya birokrasi hadir untuk memenuhi kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan prosedur formal.

Dengan demikian, aspek-aspek reformasi birokrasi meliputi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, regulasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi, serta pelayanan publik. Kelima aspek ini saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara menyeluruh agar reformasi birokrasi benar-benar mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi pemerintah yang relevan dengan tema reformasi birokrasi dan good governance. Menurut Creswell (2018), studi literatur berfungsi tidak hanya sebagai dasar konseptual penelitian, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, membangun kerangka teoritis, dan memperkuat argumentasi ilmiah. Dengan metode ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi fokus pada analisis kritis terhadap gagasan, konsep, dan praktik yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur akademik dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas kajian. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema utama, kemudian membandingkan serta mensintesis temuan dari berbagai sumber. Sejalan dengan pendapat Snyder (2019) dalam Literature Review as a Research Method, studi literatur bukan hanya rangkuman pasif, melainkan sebuah proses sistematis untuk meninjau, mengevaluasi, dan mengintegrasikan hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan pemahaman baru yang lebih komprehensif. Dengan demikian, metode studi literatur ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango dalam kerangka mewujudkan good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat sebagai sebuah upaya transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah. Upaya ini tidak hanya terbatas pada penyederhanaan prosedur administratif, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih substantif seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan perbaikan mekanisme pengawasan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta supremasi hukum.

Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan reformasi di Bone Bolango adalah adanya penyederhanaan prosedur pelayanan publik. Selama ini birokrasi sering dicitrakan lamban, berbelit-belit, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan. Melalui reformasi, pemerintah daerah berusaha memangkas jalur birokrasi yang tidak perlu dan menata ulang prosedur kerja agar lebih sederhana dan cepat. Dengan adanya langkah ini, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien serta memberikan kepastian waktu dan biaya. Masyarakat tidak lagi harus melewati proses panjang hanya untuk mendapatkan layanan dasar, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun perlahan meningkat.

Selain itu, reformasi birokrasi di Bone Bolango juga sangat ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan sistem elektronik menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) misalnya, mulai diterapkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi lebih mudah, memantau proses pelayanan secara daring, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Teknologi informasi tidak hanya membantu mempercepat pelayanan, tetapi juga meminimalisasi potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang biasanya tumbuh dalam birokrasi manual.

Peningkatan kompetensi aparatur juga menjadi perhatian dalam implementasi reformasi birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aktor utama birokrasi dituntut untuk memiliki integritas, profesionalitas, dan kemampuan teknis yang memadai. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan teknis, agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Reformasi birokrasi tidak akan berjalan optimal apabila aparatur masih terjebak pada budaya kerja lama yang cenderung kaku, hierarkis, dan kurang inovatif. Oleh karena itu, perubahan mentalitas dan budaya kerja ASN menjadi hal yang sangat penting agar reformasi benar-benar menghasilkan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas menjadi hambatan yang cukup signifikan. Tidak semua aparatur memiliki keterampilan memadai dalam mengoperasikan teknologi digital atau memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga muncul dari sebagian aparatur yang masih nyaman dengan pola kerja lama. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dan mentalitas.

Selain hambatan internal, terdapat pula permasalahan dalam hal pengawasan dan partisipasi publik. Sistem pengawasan yang ada belum berjalan secara optimal, sehingga masih terdapat ruang untuk praktik penyalahgunaan kewenangan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya birokrasi juga masih rendah akibat keterbatasan literasi dan akses terhadap informasi publik. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam mendorong birokrasi yang akuntabel dan responsif. Rendahnya partisipasi ini berpotensi membuat birokrasi berjalan tanpa kontrol sosial yang memadai.

Melihat tantangan tersebut, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan inovatif agar agenda reformasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, sehingga rekrutmen, promosi, dan mutasi benar-benar

berbasis pada kinerja, kompetensi, dan integritas. Selain itu, perluasan digitalisasi layanan publik harus terus dilakukan untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses masyarakat. Penguatan mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal juga harus diprioritaskan agar tercipta birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Lebih jauh lagi, literasi masyarakat terkait hak-hak pelayanan publik harus ditingkatkan agar publik dapat lebih aktif terlibat dalam mengawal jalannya reformasi birokrasi. Dengan adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango dapat dipandang sebagai sebuah proses berkelanjutan yang masih memerlukan penyempurnaan, tetapi telah menunjukkan langkah-langkah positif menuju terwujudnya prinsip good governance.

Ulasan Judul

Judul penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan layanan publik. Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan agenda nasional yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dengan tujuan menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan mengaitkan reformasi pada tata pelaksanaan layanan publik, penelitian ini menitikberatkan analisis pada aspek yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat, yakni kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Kabupaten Bone Bolango dipilih sebagai objek kajian karena merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang aktif melakukan inovasi dalam bidang pelayanan publik. Pemerintah daerah berusaha mendorong perubahan birokrasi agar lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap masyarakat. Pemilihan kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal.

Fokus utama dari judul ini terletak pada kata implementasi, yang menunjukkan bahwa penelitian menekankan pada praktik nyata, bukan hanya teori. Implementasi penting dikaji karena sering kali kebijakan reformasi birokrasi berhenti pada tataran dokumen dan slogan politik tanpa perubahan signifikan di lapangan. Dengan melihat praktik di Bone Bolango, penelitian ini ingin menilai sejauh mana kebijakan reformasi benar-benar dijalankan, apa hasil yang diperoleh, dan hambatan apa yang muncul dalam prosesnya.

Judul ini juga memperlihatkan hubungan erat antara reformasi birokrasi dengan pelayanan publik. Reformasi tidak dapat dikatakan berhasil jika masyarakat masih merasakan pelayanan yang lamban, tidak transparan, atau sarat praktik KKN. Sebaliknya, perbaikan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, dan transparan menjadi indikator konkret keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, tata pelaksanaan layanan publik diposisikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Secara lebih luas, penelitian dengan judul ini memiliki signifikansi bagi pembangunan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hasil kajian di Kabupaten Bone Bolango dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik reformasi birokrasi di daerah serta menjadi referensi untuk memperkuat agenda reformasi di wilayah lain. Dengan demikian, judul ini relevan karena tidak hanya mengangkat persoalan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan konsep good governance secara nasional.

KESIMPULAN

Judul penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi karena menyentuh persoalan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, yakni bagaimana reformasi birokrasi dapat diimplementasikan secara

nyata pada pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemilihan Kabupaten Bone Bolango sebagai studi kasus menjadi tepat, sebab daerah ini aktif melakukan inovasi pelayanan publik dan menunjukkan upaya serius dalam membangun birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan pro-rakyat.

Kekuatan utama dari judul ini terletak pada fokusnya terhadap praktik implementasi, yang memungkinkan peneliti menilai sejauh mana kebijakan reformasi birokrasi benar-benar dijalankan di lapangan. Namun, terdapat kelemahan potensial apabila analisis hanya terbatas pada prosedur administratif tanpa melihat dampak substantif terhadap kepuasan masyarakat dan tercapainya prinsip *good governance*.

Dengan demikian, judul ini dapat menjadi landasan yang baik untuk penelitian akademik maupun rekomendasi kebijakan, asalkan pembahasan diarahkan tidak hanya pada proses implementasi, tetapi juga pada hasil yang nyata dan tantangan yang dihadapi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penguatan reformasi birokrasi di tingkat daerah sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen reformasi birokrasi*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian PAN-RB. (2010). *Grand design reformasi birokrasi 2010–2025*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Marwanto, & Nurhidayat. (2020). Hambatan implementasi reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 145–160.
- Prasojo, E. (2022). Reformasi birokrasi dan tantangan tata kelola. *Rajawali Pers*.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Wahyudi, A. (2020). Partisipasi publik dalam reformasi birokrasi. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 11(1), 32–49.
- Wicaksono, A. (2019). Resistensi aparatur terhadap reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 201–215.